

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Praktik komunikasi krisis saat pandemi covid-19 di Kota Semarang Tahun 2020 tidak memiliki kesesuaian hasil dengan teori yang dikemukakan oleh Reynolds dan Matthew W. Seeger. Ketidaksesuaian ditemukan sejak fase pra krisis, salah satunya dilandaskan dari koordinasi dalam pengambilan keputusan kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah. Pemerintah pusat telah memberikan instruksi bahwa segala perumusan dan putusan kebijakan terkait covid-19 dan penanganannya di pemerintah daerah, wajib disetujui terlebih dahulu oleh pusat. Menyesuaikan dengan instruksi pusat tersebut, Pemerintah Kota Semarang belum melakukan upaya kebijakan terkait pencegahan penyebaran virus covid-19 secara terperinci dan mendalam. Akibatnya pada fase awal krisis, Pemerintah Kota Semarang mengizinkan berlabuhnya Kapal MV Columbus yang di dalamnya terdapat Warga Negara Asing dengan status positif covid-19.

Di sisi lainnya, Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 yakni dengan memberlakukan: himbauan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun dan/atau handsanitizer, serta Menjaga jarak); program jogo tonggo; kampung siaga candi hebat; penyemprotan desinfektan di lokasi-lokasi tinggi paparan covid-19, dan pembiasaan kehidupan normal baru (*new normal*). Kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang diselenggarakan sebelum Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 diberlakukan, yakni Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebagai upaya

maksimalisasi dalam pelaksanaan PPKM, Pemerintah Kota Semarang melakukan refocussing anggaran terhadap kegiatan perekonomian khususnya di instansi-instansi. Namun program-program dalam rangka realisasi kebijakan penanganan penyebaran virus covid-19 oleh Pemerintah Kota Semarang serta pengurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ke pemerintahan, mengalami dilematis ditengah masyarakat. Pelonggaran dan pengetatan PPKM menimbulkan disinformasi bagi masyarakat, serta media sebagai corong informasi tidak seluruhnya memberitakan data yang aktual.

Selain penanganan penyebaran virus covid-19 dari sisi kesehatan, Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan upaya untuk menstabilkan ekonomi saat pandemi covid-19. Walaupun hasil dari penanganan di sisi ekonomi tidak berjalan sesuai rencana, dibuktikan dengan defisit anggaran serta pemenuhan inovasi kebijakan belum terlaksana secara maksimal. Komunikasi krisis yang seharusnya menjadi media informasi mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan arahan dari pusat berjalan setelah dilaksanakannya kajian data mengenai kesesuaian covid-19 sebagai bencana non alam melalui Kepres No. 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April Tahun 2020.

Maka dari itu komunikasi krisis selama pandemi covid-19 di Kota Semarang pada Tahun 2020 disimpulkan memiliki praktik yang berjalan tidak maksimal berdasar dari persoalan-persoalan di dalamnya, yakni dengan ciri-ciri: 1) Realisasi dalam Pembuatan dan Penentuan Kebijakan; 2) Sikap Masyarakat terhadap Penyampaian Informasi; dan 3) Koordinasi Informasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Semarang. Dan memiliki faktor-faktor dari sisi ekonomi

politik, sebagai berikut: 1) Keterlambatan informasi sebagai bentuk inkapasitas pemerintah; 2) Ketidakpastian informasi terkait lockdown sebagai refleksi dilema prioritas kebijakan (antara kesehatan dan ekonomi); dan 3) Disinformasi pandemi covid-19 antara pusat dan daerah. Ditemukannya ciri-ciri dan faktor-faktor praktik komunikasi yang buruk tersebut, maka perlu adanya upaya dalam memperbaiki, supaya hasil penelitian ini dapat digunakan pada gelombang pandemi berikutnya.

## **5.2 Saran dan Rekomendasi**

Pandemi covid-19 di Kota Semarang yang sampai saat ini masih terus ada, tetap konsisten dalam menggunakan Kebijakan PPKM. Sistem pengetatan dan pelonggaran kebijakan terhadap kegiatan masyarakat dipaksakan untuk tetap berjalan. Hingga pada akhir Tahun 2021 pengendalian laju pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang masih dinamis dan cenderung melambat, sementara itu masyarakat memiliki pemahaman terkait covid-19 yang variatif tergantung dari lingkungan sosialnya. Sehingga dari fenomena yang ada dan berdasarkan dari hasil pengamatan dan temuan, peneliti memberikan saran agar peraturan mengenai praktik komunikasi krisis selama pandemi covid-19 berjalan tidak statis melainkan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat yang mayor dan laju ekonomi. Sebab instruksi dari pemerintah pusat tidak seluruhnya harus berjalan vertikal, melainkan horizontal dengan inovasi-inovasi yang lebih strategis kepada masyarakat untuk segera memperbaiki tatanan pemahaman masyarakat akan bahaya covid-19 dan kesadaran masyarakat untuk praktek dalam upaya pemulihan ekonomi melalui kegiatan ekonomi kreatif secara mandiri.

Kasus pertumbuhan covid-19 di Kota Semarang masih bersifat fluktuatif sampai hari ini, maka peneliti memberikan rekomendasi terhadap hasil penemuan ini untuk dilanjutkan oleh para peneliti selanjutnya sebagai pengkayaan kajian ilmu sosial-politik mengenai upaya penanganan kebencanaan melalui praktik komunikasi krisis yang seharusnya diterapkan secara terstruktur dan sistematis sejak awal dibentuknya rancangan kebijakan daerah. Hal ini dikarenakan, kasus pandemi covid-19 yang termasuk isu kebencanaan non alam datang secara spontan dan memiliki resiko besar dalam laju pertumbuhan seluruh aspek di tingkatan sosio-kemasyarakatan. Apabila tidak ditangani secara informatif melalui komunikasi krisis, maka dikemudian hari kasus-kasus kebencanaan non alam yang akan terjadi selanjutnya akan membahayakan sistem tatanan pemerintahan khususnya di daerah.